

BAB V PEMBAHASAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

Masyarakat sekarang ini pada umumnya sudah lebih memahami dunia politik, namun untuk terjun ke dunia politik masih sedikit. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih terbawa sampai kini, padahal perubahan zaman menuntut agar masyarakat harus lebih banyak belajar dan mengetahui isu yang berkembang, terlebih halnya dalam kancah politik. Kecenderungan masyarakat yang kurang berminat untuk terjun ke politik juga disebabkan pengaruh partai-partai politik yang dianggap masyarakat sebagai tempat untuk menekuni dunia politik.

Bila diperhatikan keberadaan partai politik di Indonesia tidak terlepas dari konflik-konflik intern dan extern. Hal ini sangat berpengaruh dengan perkembangan politik dan pandangan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Menurut Duverger (Arbi Sanit : 1981) ada tiga tipe konflik dalam partai politik, pertama ialah konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar yang prinsipil, kedua ialah konflik yang timbul karena terdapat perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tapi tidak mengenai prinsip itu sendiri, dan yang ketiga ialah konflik sama sekali bertolak dari suatu prinsip dasar. Dalam hal ini masyarakat menjadi kurang berminat memasuki dunia politik melihat fenomena yang terjadi dalam kepengurusan politik tersebut.

Selain itu, persepsi masyarakat tentang dunia politik begitu sempit sebab menganggap politik itu sangat kejam dan hanya mengejar kekuasaan yang bisa merugikan orang lain. Oleh sebab itu rasa malas masyarakat untuk menekuni politik sudah tertanam dalam diri masyarakat itu. Selain itu kurangnya perhatian masyarakat terhadap politik juga disebabkan dari sejak pemilu pertama di Indonesia 1955 sampai

dengan 1999 partai politik merupakan kendaraan seseorang untuk memasuki dunia politik dalam mengejar jabatan di pemerintahan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi yang telah bergulir dalam mewujudkan aspirasi masyarakat telah terjadi sebuah perubahan pada tahun 2004. Adapun perubahan itu dalam menuju demokrasi yang diinginkan adalah pemilihan umum. Pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu rakyat sudah bisa bernafas lega tatkala rakyat bisa menentukan sendiri wakil-wakilnya dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Perubahan pada pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2004 juga terjadi, dimana seseorang bisa mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan membantu menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat. Dengan adanya kesempatan menjadi elit politik tanpa melalui partai politik membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk terjun ke politik. Namun dari kesempatan itu masih sedikit dari jumlah masyarakat yang ingin menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Demikian juga halnya di Sumatera Utara. Seperti yang diketahui penulis dilapangan bahwa calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi calon anggota DPD sebanyak 151 orang, setelah diverifikasi KPU SUMUT dari persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang bisa menjadi calon anggota DPD Sumatera Utara pada pemilihan umum tahun 2004 sebanyak 48 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk terjun ke dunia politik masih relatif rendah.

Dalam pemilihan umum tahun 2004 yang lalu, calon anggota DPD ini harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dari jumlah keseluruhan dari Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Hal ini berbeda dengan calon legislatif yang melalui kendaraan partai politik. Dengan kata lain, calon anggota DPD ini harus berjuang dan mengatur strategi untuk merekrut suara di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, sebab dalam pemilihan umum tahun 2004 yang lalu mereka harus mampu menjaring dukungan langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian ini dibahas tentang jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004 di Sumatera Utara. Pembahasannya diawali dari strategi jaringan politik calon dan anggota DPD dalam meraih dukungan masyarakat di Sumatera Utara. Dalam pembahasan ini difokuskan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini antara lain jaringan politik calon dan anggota DPD berdasarkan hubungan kekerabatan (*genealogy*), *agenda*, *political cost* dan keterlibatan Tim Sukses masing-masing.

5.1. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

Salah satu langkah yang dilakukan calon dan anggota DPD dalam mengumpulkan dukungan suara pada pemilihan umum adalah dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan antara lain keluarga, teman sejawat, semarga dan daerah asal. Pemanfaatan jaringan politik melalui hubungan kekerabatan merupakan langkah yang sangat sederhana karena strategi seperti ini tidak begitu sulit dilakukan dalam mengumpulkan dukungan suara. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengenai jaringan politik calon dan anggota DPD dalam meraih dukungan suara melalui hubungan kekerabatan **Pertama**, sosialisasi politik (*political socialization*) tidak sulit dilakukan sebab pada dasarnya melalui hubungan kekerabatan calon sudah dikenal pemilih, terlebih halnya

dalam lingkungan keluarga dekat. Demikian juga dengan teman sejawat. dimana selama ini ada hubungan antara atasan dan bawahan (patron client) bahkan faktor kedekatan selama ini juga merupakan modal dalam pengumpulan suara calon dan anggota DPD ini dalam pemilihan umum. Selain itu faktor satu marga dan daerah asal tak luput dari strategi jaringan politik calon dan anggota DPD untuk dimanfaatkan dalam proses pendulangan suara pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu. **Kedua, Partisipasi Politik (Political Participation)** masyarakat melalui hubungan keluarga dan kerabat lebih mudah didapatkan sebab rasa kepedulian dan keinginan untuk memperoleh kesempatan menjadi seseorang yang mempunyai kekuasaan pada dasarnya timbul dari keinginan keluarga dan kerabat itu sendiri.

Ketiga, Komunikasi Politik (Political Communication) lebih mudah dibangun sebab kedekatan dan sikap saling mengenal selama ini menjadi tolak ukur keberhasilan pengumpulan dukungan suara calon dan anggota DPD tersebut. Komunikasi politik gunanya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai komunikasi politik ini, Bogardus dalam Rusadi (1983 : 64)

"Almost synonymous with the term interaction is another communication. Communication is the first and all the time nothing if it is not interaction. Communication is interaction particularizes. It is interaction in terms of particular stimuli and counter stimuli. It is interaction through the specific use of symbols and their meanings, that is, of symbols that are stimuli and that are responded to according to their meanings for the observers and listeners. In turn these meaning are new stimuli and thus the process of interaction goes on. Communication is the use by one individual of symbols whose meanings are understood by other person".

(Yang hampir sama arti dengan istilah interaksi ialah Komunikasi. Komunikasi bukan apa-apa kalau bukan interaksi. Komunikasi adalah interaksi secara khusus, yaitu stimuli kontra stimuli. Komunikasi adalah interaksi melalui penggunaan symbol atau makna yang secara khas, yaitu merupakan rangsangan yang mendapat tantangan sesuai dengan maknanya bagi pengamat dan pendengar yang bersangkutan. Sebaliknya makna ini merupakan rangsangan baru dan dengan demikian proses interaksi terus berjalan. Komunikasi adalah pemakaian simbol oleh individu, yang makna atau artinya dimengerti oleh orang lain).

Dengan adanya hubungan yang sudah terbina melalui komunikasi dengan keluarga dan kerabat ternyata memudahkan calon untuk mengenalkan diri sebagai calon dan anggota DPD dengan harapan pemilih menyalurkan aspirasinya melalui interaksi secara khusus terhadap calon pada pemilihan umum. Keempat, rekrutmen politik dengan melibatkan keluarga dan kerabat lebih efisien sebab keberadaan pemilih sebagai keluarga dan kerabat calon juga mempunyai kepentingan terhadap jaringan politik calon dan anggota DPD itu.

Dari keempat alasan peneliti kemukakan diatas terlihat bahwa jaringan politik calon dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sudah terbentuk sedemikian halnya karena faktor ikatan yang melekat melalui hubungan genealogis sangat erat.

5.2. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD melalui Peranan Agama

Seperti diketahui bahwa sejak pemilu 1955 sampai dengan 1999 agama tidak terlepas dari jembatan elit politik dan partai politik dalam mewujudkan harapan menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan (power). Demikian halnya pada pemilihan umum pada tahun 2004 yang lalu, dimana sistem pemilu adalah proporsional terbuka yaitu pemilih langsung memilih wakilnya berdasarkan tanda gambar yang ada dilembar kertas surat suara. Selain itu hal yang berbeda pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 yang lalu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah rakyat juga memilih langsung wakil yang dikehendaki, sehingga para calon anggota DPD ini harus mampu menarik simpati masyarakat melalui strategi politik yang dijalankan.

Strategi jaringan politik calon dan anggota DPD selain melibatkan hubungan genealogis juga tidak terlepas dari pengaruh agama yang dianut para calon. Walaupun sebahagian calon dan anggota DPD ini mengklaim dirinya sebagai orang yang bersifat nasionalis, namun realita yang diperoleh peneliti dari lapangan pengaruh agama masih mewarnai pemilihan anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu.

Seperti diketahui bahwa di Sumatera Utara persentase penduduk menurut agama Islam sebesar 65,45%, Protestan 26,62%, Khatolik 4,78%, Budha 2,82%, Hindu 0,019% dan lainnya 0,14%. Sementara itu calon anggota DPD yang dipilih pada pemilu legislatif 2004 sebanyak 48 orang dan menganut agama yang berbeda-beda. Dari hasil perolehan suara calon dan anggota DPD terlihat bahwa jaringan politik yang dilakukan calon dan anggota DPD di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa calon yang didukung masyarakat yang agamanya sama dan mayoritas di satu Kabupaten/Kota akan memperoleh suara terbanyak walaupun belum significant, sebab calon anggota DPD itu banyak berasal dari agama yang sama.

Strategi jaringan politik calon dan anggota DPD selain melibatkan hubungan genealogis juga tidak terlepas dari pengaruh agama. Pemanfaatan jaringan politik melalui peranan agama dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, melalui spanduk, gambar-gambar yang menampakkan identitas calon anggota DPD bagi masyarakat yang seiman dengan calon. Dengan melakukan sosialisasi diri melalui spanduk dan gambar-gambar ditujukan kepada masyarakat pemilih yang belum mengenal calon dan belum menentukan pilihannya. Kedua, melalui pendekatan agama, baik dalam acara formal maupun informal. Dalam acara formal calon anggota DPD yang berkedudukan sebagai penceramah agama biasanya melakukan ceramah dan sekaligus mensosialisasikan diri

kepada umatnya bahwa beliau adalah calon dan anggota DPD ini hanya sebagai tamu apabila ada undangan dari masyarakat dan Tuan rumah yang memperkenalkan mereka. Ketiga, melalui pendekatan dengan tokoh-tokoh agama atau pemuka agama yang dianggap sangat berpengaruh dikalangan masyarakat, sebab tokoh agama dan pemuka agama menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat yang masih tradisional, sehingga dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh ini diharapkan mampu mendulang suara. Keempat, melalui organisasi-organisasi keagamaan itu juga turut serta mendukung calon anggota DPD ini. Kelima, melalui pendekatan dengan partai-partai politik yang berlandaskan keagamaan. Hal ini dilakukan agar massa pendukung partai politik yang pengaruhnya sampai kedaerah-daerah juga mendukung calon anggota DPD tersebut.

Dari kelima alasan yang dikemukakan diatas terlihat bahwa jaringan politik calon dan anggota DPD melalui peranan agama juga dimanfaatkan oleh elit politik ini. Pengaruh agama bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Menurut Soefihara (2005 : 59) pemilih muslim (Islamic Voters) sangat strategis untuk mendongkrak perolehan suara terlebih halnya dalam perolehan suara partainya. Rekrutmen merupakan indikator paling nyata Islam masih menjadi kekuatan pengumpul suara partai. Itu sebabnya, dalam setiap pemilu, suara pemilih muslim selalu diperebutkan oleh banyak partai.

Oleh sebab itu, jelas terlihat bahwa pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD yang berasal dari agama yang berbeda juga memanfaatkan pengaruh agama dalam proses strategi penjangkaran massa pendukung dalam pemilihan umum tahun 2004. Strategi seperti ini dimanfaatkan mengingat calon anggota DPD ini, bersifat independent sehingga bisa mempengaruhi calon melalui pengaruh agama.

5.3. Jaringan Politik Calon dan Anggota DPD Dalam Mensosialisasikan Diri Dengan Pembiayaan Politik (Political Cost)

Dalam berpolitik tidak terlepas dari pembiayaan politik (political cost). Hal ini yang dilakukan calon dan anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2004 Untuk meraih dukungan suara pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada pemilihan umum tahun 2004 bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dimana calon belum semua dikenal oleh rakyat. Oleh karena itu calon anggota DPD ini harus mensosialisasikan diri kepada masyarakat pemilih terlebih halnya pada masyarakat yang awam. Dalam proses mensosialisasikan diri kepada masyarakat, calon anggota DPD ini membutuhkan dana untuk mengatur strategi dalam mencari dukungan masyarakat. Langkah politik yang dilakukan. **Pertama**, pengenalan melalui gambar-gambar dan spanduk atau alat dan prasarana lainnya. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat calon anggota DPD ini adalah utusan perorangan. Selain itu dukungan suara yang dikumpulkan adalah dari seluruh masyarakat pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. **Kedua**, dalam menarik simpati masyarakat, calon anggota DPD ini ada yang memberikan sumbangan kepada rakyat sebagai wujud kepeduliannya terhadap ekonomi rakyat yang tidak mampu. Wujud kepedulian itu diperlihatkan melalui pembangunan sarana dan prasarana pada daerah yang masyarakat miskin dan tertinggal. Hal ini juga membutuhkan dana. **Ketiga**, untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat sebahagian dari calon anggota DPD ini melakukan komunikasi politik melalui media massa dan elektronik. Dalam melakukan komunikasi politik seperti ini calon anggota DPD ini tidak sedikit mengeluarkan biaya agar mudah dikenal oleh public atau masyarakat.

Keempat, salah satu strategi dalam jaringan politik adalah melalui lobi-lobi politik. Dalam melakukan lobi-lobi politik ini calon dan anggota DPD ini juga mendanai tim-tim lobi politik yang bekerja keras agar calon yang dilobi bisa berhasil memperoleh suara terbanyak.

Dengan demikian, pemanfaatan jaringan politik calon dan anggota DPD pada pemilihan umum tidak terlepas dari pengaruh uang yang dimiliki calon dalam usaha mengumpulkan dukungan suara dari masyarakat. Hal ini seperti yang terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan seperti yang telah dipaparkan penulis diatas.

5.4. Jaringan Politik Calon Dan Anggota DPD Melalui Pelibatan Tim Sukses

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004, dimana rakyat selain memilih partai politik juga memilih calon anggota DPD. Dalam hal ini calon anggota DPD tersebut harus melakukan strategi penjaringan dukungan melalui langkah-langkah politik yang diambil diantaranya melibatkan hubungan kekerabatan, agama, uang dan membentuk Tim Sukses.

Dalam jaringan politik pelibatan Tim Sukses untuk mencari dukungan kepada masyarakat merupakan langkah strategis, sebab kelompok Tim Sukses ini adalah kelompok yang bisa disebut sebagai kelompok strategis dalam proses pelaksanaan pengumpulan suara dalam pemilu. Menurut Evers (1992 : 12) kelompok strategis mempunyai arti yang penting untuk perkembangan politik, situasi konflik, reformasi ataupun revolusi dalam masyarakat masing-masing. Secara aktif mereka mewakili tujuan politiknya sendiri. Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin yang dianggap mewakili keinginannya.

Peranan kelompok yang dibentuk demi kepentingan politik sangat penting dalam mengatur strategi untuk memenangkan calon dalam setiap pemilihan terlebih halnya dalam pemilihan umum tahun 2004, dimana rakyat memilih langsung figur-figur elit politik yang mampu mewakili aspirasinya.

Jaringan politik anggota DPD ini dengan melibatkan Tim Sukses mempunyai alasan sebagai berikut. **Pertama**, lebih mudah menjangkau dan merekrut massa pendukung yang berada di luar tempat domisili calon tersebut. Hal ini dilakukan karena pengumpulan dukungan suara tidak hanya pada satu Kabupaten Kota saja melainkan dari seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Utara. **Kedua**, dalam merekrut dukungan suara pada Kabupaten/Kota lebih efisien dan terorganisir, maksudnya dalam proses pengumpulan suara yang berada pada Kabupaten Kota bisa diketahui sejauhmana masyarakat pemilih mendukung calon itu atau bisa diketahui berdasarkan data base dari peta kekuatan politik yang dibuat Tim Sukses. **Ketiga**, dalam penggunaan dana yang dikeluarkan lebih terarah, sebab calon sudah bisa memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan dalam agenda acara-acara yang berkaitan dengan proses mensosialisasikan calon pada masyarakat. **Keempat**, dengan melibatkan Tim Sukses berarti membuka strategi untuk melakukan pendekatan terhadap simbol-simbol massa atau dengan komunitas pemilih tertentu. Strategi pendekatan politik kepada pemilih bisa dilakukan dengan partai-partai politik, organisasi politik, kaum intelektual, kaum profesional, dan kelompok lainnya. Jaringan politik seperti ini tidaklah mudah untuk dilakukan apabila tidak melibatkan out group (kelompok luar) dari keberadaan calon. Dalam hal ini adalah keterlibatan Tim Sukses dalam proses rekrutmen dukungan suara dalam pemilihan umum, dimana calon sebagai peserta perorangan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, strategi jaringan politik yang banyak melibatkan Tim Sukses dalam meraih dukungan suara dilakukan oleh anggota DPD yang berhasil duduk. Sedangkan calon anggota DPD yang gagal tidak banyak melibatkan Tim Sukses mereka dan lebih banyak melakukan sosialisasi melalui pendekatan pribadi kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, dari hasil perolehan data di lapangan menunjukkan bahwa dengan melibatkan Tim Sukses sebagai salah satu strategi jaringan politik anggota DPD ini ternyata mampu mendulang dukungan suara pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.